

Halaman Tulisan Jurnal (Judul dan Abstraksi)

*Jurnal Paradigma Ekonomika**Vol. 9, No. 01 April 2014***DAMPAK BELANJA DAERAH TERHADAP
KETIMPANGAN ANTAR DAERAH DI PROVINSI JAMBI****Rosmeli ***

*Dosen Fakultas Ekonomi Program Studi IESP Universitas Jambi
Kampus Pinang Masak Jalan Raya Jambi – Ma.Bulian Km. 15
Mendalo Darat Jambi

Abstract

Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan ketimpangan makin dirasa sangat penting. Salah satu usaha tersebut yang secara langsung bisa dirasakan masyarakat adalah melalui anggaran belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana belanja daerah yang dialokasikan diharapkan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan pengurangan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Selama tahun 2001-2013 terjadi peningkatan ketimpangan antar wilayah di Provinsi Jambi dengan rata – rata Williamson indeks sebesar 0.3964. Bila dilihat dari pengaruh belanja daerah terhadap ketimpangan, belanja langsung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan sementara belanja tidak langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah di Provinsi Jambi.

Kata Kunci: Belanja Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Tujuan dari pembangunan ekonomi di setiap daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*social's walfare*), yang salah satunya tercermin dari Kenaikan pendapatan perkapita dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang di ukur dari kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita serta di barengi dengan usaha menekankan laju pertumbuhan penduduk, menurunkan angka inflasi, meningkatkan produksi, dan nilai tambah produk sektoral.

Tapi dalam kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menyebabkan daerah menjadi lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tidak diiringi dengan menurunnya inflasi menyebabkan ketimpangan antar daerah menjadi semakin besar, ditambah lagi dengan semakin dioptimalkannya kekayaan daerah terutama dari sektor tambang semakin memperlebar kesenjangan wilayah. Salah satu tujuan dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah menciptakan pemerataan antar daerah kesenjangan ekonomi dan sosial

antar wilayah yang mungkin terjadi sedapat mungkin diperkecil dengan dilaksanakannya pembangunan daerah secara terpadu dan serasi sesuai dengan potensi daerah.

Sebagai salah satu provinsi yang ada, Provinsi Jambi terus memacu peningkatan ekonominya melalui berbagai program kebijakan. Setiap Kabupaten/Kota tersebut terus berusaha memacu pertumbuhan ekonomi mereka melalui peningkatan aktifitas ekonominya, hal ini dapat terlihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang beragam.

Menurut Landiyanto (2005), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan suatu otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berartidaerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk mengelolah pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin. Pengalialan otoritas pengelolaan daerah dari pemerintah pusat ke daerah ternyata tidak dapat dilakukan di semua daerah

begitu juga dengan kemandirian penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah. Hal ini berhubungan dengan potensi serta sumberdaya yang terdapat di daerah otonom, dimana karakteristik masing-masing daerah mempengaruhi potensi serta sumber daya yang terdapat di dalamnya. Perbedaan tersebut mendorong terjadinya perbedaan kemampuan finansial pada masing-masing daerah.

Dalam pembangunan nasional anggaran pembangunan lebih ditekankan pada pembangunan secara menyeluruh baik fisik maupun non fisik. Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan ketimpangan makin dirasa sangat penting. Salah satu usaha tersebut yang secara langsung bisa dirasakan masyarakat adalah melalui anggaran belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana belanja daerah yang dialokasikan diharapkan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan pengurangan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan metode *Library Research* (kepuustakaan) yang mana metode dalam penelitian ini nantinya menggunakan teori-teori yang diambil dari buku literatur dan spesifikasinya sebagai pedoman yang mendukung dan relevan dengan pembahasan.

Untuk menjawab pertanyaan pertama digunakan alat analisis berupa Indeks Williamson, dengan rumus sebagai berikut :

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n} \right)}}{y}$$

Untuk menjawab pertanyaan kedua digunakan alat analisis berupa model persamaan regresi sederhana yang ditransformasikan secara operasional kedalam bentuk persamaan berikut.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Jambi

Selain pertumbuhan, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pemerataan pembangunan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia adalah Indeks Williamson.

Tabel 5.1. Indeks Williamson Provinsi Jambi tahun 2001-2013

Tahun	Indeks Williamson
2001	0.3568
2002	0.3756
2003	0.3751
2004	0.3721
2005	0.3764
2006	0.3766
2007	0.3742
2008	0.4018
2009	0.3740
2010	0.4094
2011	0.4109
2012	0.4797
2013	0.4840
Rata-rata	0.3964

Sumber: Data diolah

Dari tabel 5.1 terlihat bahwa nilai Indeks Williamson (Vw) Provinsi Jambi secara rata-rata selama tahun 2001-2013 sebesar 0,3964, ini berarti ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Jambi selama tahun tersebut termasuk kedalam ketimpangan yang tergolong sedang. Sedangkan nilai Vw terendah Provinsi Jambi terjadi pada tahun 2001 juga tergolong sedang sebesar 0,3568. Dan nilai Vw tertinggi pada tahun 2013 sebesar 0,4840 tergolong pada ketimpangan pendapatan yang tinggi.

Tingginya ketimpangan pada tahun 2014 dikarenakan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang cukup besar di beberapa daerah seperti Kota Jambi, Sarolangun, Bungo dan Tanjaung Jabung Barat yang akhirnya berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dan peningkatan pendapatan perkapita, sementara daerah – daerah lain memberikan pertumbuhan ekonomi yang tidak jauh mengalami perubahan.

Secara umum, penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Jambi ini yaitu faktor kepemilikan sumber daya alam dan faktor persebaran penduduk.

Beberapa Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, Batanghari, Sarolangun, dan Tebo memiliki sumber minyak dan gas alam sementara Kabupaten/Kota lainnya tidak memiliki sumber migas. Seperti diketahui produksi migas agak sulit diprediksi begitu juga dengan harganya. Harga migas yang tinggi akan berdampak meningkatnya nilai PDRB pada daerah-daerah yang memiliki potensi sumber migas. Peningkatan PDRB akan diikuti dengan peningkatan pendapatan perkapita pada daerah berpotensi, sedangkan daerah yang tidak memiliki potensi migas pendapatannya cenderung rendah dibanding daerah berpotensi.

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Jambi

Dari hasil regresi diketahui besarnya koefisien determinasi adalah 26.7%, ini berarti Ketimpangan antar wilayah dapat dijelaskan dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar 26.7% sedangkan sisanya 73.3% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Kecilnya nilai R square yang diperoleh dalam analisis ini dimungkinkan dikarenakan belanja langsung dan belanja tidak langsung tidak mempunyai pengaruh yang langsung terhadap pembentukan ketimpangan antar wilayah di Provinsi Jambi.

Konstanta sebesar 0.327 yang berarti jika belanja langsung dan belanja tidak langsung tetap maka ketimpangan antar wilayah di Provinsi Jambi sebesar 32.7%.

Nilai koefisien regresi dari variabel belanja langsung adalah 0.106, ini berarti jika terjadi peningkatan belanja langsung sebesar 1% maka ketimpangan antar wilayah akan mengalami peningkatan sebesar 0.106 point, peningkatan ini karena kurang meratanya alokasi dana belanja tidak langsung di beberapa daerah di Provinsi Jambi sehingga pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi ketimpangan antar daerah hanya dilakukan di daerah – daerah tertentu saja dan belum mencapai pelosok – pelosok desa yang merupakan sentra pertanian.

sementara untuk koefisien regresi belanja tidak langsung sebesar -0.100 ini berarti jika terjadi peningkatan belanja tidak langsung sebesar 1% maka akan mengurangi ketimpangan antar wilayah sebesar 0.100 point.

Implikasi Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa ketimpangan antar wilayah diprovinsi Jambi semakin mengalami peningkatan setiap tahunnya yang ditunjukkan dengan semakin besarnya koefisien Williamson indeks. Bila dilihat berdasarkan belanja daerah, belanja tidak langsung dapat mengurangi ketimpangan antar daerah sementara belanja langsung berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan antar daerah oleh karenanya pemerintah Provinsi beserta pemerintah daerah harus melakukan beberapa alternative kebijakan diantaranya:

1. Membangun infrastruktur yang baik terutama jalan dengan pola menyebar ke daerah-daerah terutama daerah yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti sayur-sayuran.

Pembangunan infrastruktur yang baik melalui belanja modal yang merupakan komponen dalam belanja langsung dengan sendirinya akan mengurangi ketimpangan antar wilayah, karena dapat mempercepat mobilitas perekonomian. r.

2. Alokasi belanja daerah pada sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Dengan semakin banyaknya kesempatan kerja yang tercipta sebagai dampak dari alokasi belanja daerah khususnya belanja langsung maka akan mendorong terjadinya peningkatan pendapatan penduduk. Pada sisi alokasi belanja langsung diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia 5melalui program pendidikan dan latihan serta peningkatan kualitas kesehatan. Hal ini demi terciptanya peningkatan angka harapan hidup sebagai cerminan kesejahteraan masyarakat.

3. Peningkatan belanja tidak langsung dalam jangka pendek dapat mengurangi ketimpangan antar daerah, tetapi tidak berpengaruh signifikan.

Dalam jangka panjang peningkatan belanja tidak langsung malah akan memberikan dampak terhadap peningkatan ketimpangan, karena tidak semua daerah mempunyai kemampuan yang sama dalam mengalokasikan dana untuk belanja pegawai seperti pemberian tunjangan, pemberian tunjangan, insentif, dll inilah yang akan memperlebar ketimpangan antar wilayah di Provinsi Jambi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan selama tahun 2001-2013 terjadi peningkatan ketimpangan antar wilayah di Provinsi Jambi dengan rata – rata Williamson indeks sebesar 0.3964. Bila dilihat dari pengaruh belanja daerah terhadap ketimpangan, belanja langsung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan sementara belanja tidak langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah di Provinsi Jambi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan hasil penelitian kelompok dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, H. Rahardjo. 2005. *Dasar-dasar Ekonmi Wilayah.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anonim. 2002. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi.* Jambi: Lembaga Penelitian Universitas Jambi.
- , 2013. *Beberapa Tahun Terbitan Jambi Dalam Angka.* Jambi: BPS Provinsi Jambi.
- , 2013. *Berita Resmi Statistik Provinsi Jambi* dalam <http://jambi.bps.go.id/> akses tanggal 12 Mei 2013.
- , 2013. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2010-2011.* Jambi: BPS Provinsi Jambi.
- , 2013. *Teori Pengeluaran Pemerintah* dalam <http://catarts.wordpress.com> . Diakses Tanggal 12 Mei 2013
- Arsyad, Lincolin. 1993. *Pengantar Perencanaan Ekonomi,* Yogyakarta: Media Widya Mandala.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaann dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.
- Eroy, A.R.E. *Ketimpangan Pembangunan dan Kemiskinan* dalam <http://achmadaryarozi.worpress.com>. Diakses tanggal 15 Oktober 2014.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan.* Jakarta: UI-PRESS.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah,* Jakarta: Erlangga.
- , 2006. *Ekonomika Pembangunan (Teori, Masalah, dan Kebijakan),* Yogyakarta: UPP-STIM YKPN d/h YKP.

- Landiyanto, Erlangga Agustino (2005). *Kinerja Keuangan dan Strategi pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya*. Cures Working Paper, No. 05/01.
- Mangkusubroto, Guritno. 1995. *Ekonomi Publik, Edisi Ketiga*, Yogyakarta: Lembaga penerbit FE UGM.
- Richardson, H.W. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi*. Edisi Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Robby. *Standar Deviasi dalam* <http://robby01343.wordpress.com>. Diakses tanggal 28 April 2013
- Sjafrizal, 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Sumatera Barat: Baduose Media.
- Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Edisi kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Triyaningsih dan Rosmeli pada “*Disparitas Pendapatan di Provinsi Jambi*” Periode 2000-2008, Majalah Perspektif Bapedda 2010
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Todaro, M.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ke Tiga*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga.
- & Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ke Tiga*. Edisi kedelapan. Jakarta: Erlangga.